

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan e-government, salah satunya melalui inovasi absensi online Sinaga yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. E-government menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, setiap individu membutuhkan pelayanan yang memadai, termasuk pelayanan di bidang administrasi kepegawaian. Pelayanan ini mencerminkan kualitas pelayanan sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) untuk mendukung kinerja mereka. Salah satu inisiatif yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui inovasi absensi online Sinaga.

Sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), inovasi absensi online Sinaga hadir sebagai solusi dalam mendukung tata kelola pegawai, Terutama dalam aspek presensi pegawai, yang parameter utama dalam menilai kinerja organisasi. Melalui absensi online Sinaga, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk memperbaiki akurasi serta efisiensi pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik. Absensi online Sinaga adalah platform digital berbasis *smartphone* yang dirancang untuk mendukung percepatan berbagai layanan ASN di instanssi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang dapat diunduh melalui *Playstore* berbasis Android yang sudah dikembangkan hingga versi 4. Aplikasi absensi online Sinaga belum tersedia untuk *smartphone* berbasis IOS. Dalam aplikasi absensi online Sinaga ini terdapat berbagai macam layanan kepegawaian ASN Provinsi Jawa Tengah, diantaranya: data pegawai, pencapaian tugas, total penghasilan yang diterima, serta rekam jejak kehadiran ASN, yang mana hal-hal tersebut dapat diakses oleh ASN Provinsi Jawa Tengah dan terintegrasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Melalui absensi online Sinaga yang berbasis Android, layanan kepegawaian menjadi lebih optimal.



Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi Absensi Online Sinaga

Sumber: sinaga.bkd.jatengprov.go.id (2024)

Inovasi teknologi digital pada sektor publik telah berkembang pesat, dimana pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan mereka (Wicaksono & Dewi, 2017). Adapun pemanfaatan absensi online Sinaga dilakukan berdasarkan beberapa regulasi dan/atau peraturan berlaku, yakni Regulasi yang mengatur jam kerja dan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup beberapa kebijakan utama, seperti aturan mengenai hari dan jam kerja instansi pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Tahun 2023. Selain

itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan penyesuaian melalui peraturan gubernur yang diperbarui pada tahun 2020 terkait evaluasi kinerja ASN secara elektronik. Untuk memastikan kepatuhan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran pada tahun 2022 yang mewajibkan ASN menaati jam kerja yang ditetapkan. Lebih lanjut, teknis pelaksanaan presensi pegawai serta fleksibilitas ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diatur melalui beberapa surat edaran gubernur yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan 2022.

Sistem absensi online Sinaga menggunakan fitur pemindaian untuk meningkatkan akurasi kehadiran pegawai, tetapi terdapat indikasi bahwa sistem absensi online Sinaga masih rentan terhadap manipulasi, seperti pemalsuan foto wajah yang dapat diganti dengan foto benda lain di dalam satu titik lokasi atau pengguna dalam data absensi hadir namun kenyataanya tidak ada di lingkungan kantor. Dalam hal absensi online Sinaga, sistem ini seharusnya memberikan keuntungan seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dibandingkan sistem manual. Masalah seperti *fake* GPS dan *scan* wajah yang masih ditemukan manipulasi mengurangi pandangan mengenai keuntungan atau keunggulan sebuah inovasi. Jika inovasi tidak secara jelas menunjukkan keunggulan dibandingkan metode lama, maka tingkat adopsi akan lebih rendah.

Tabel 1.1 Pelanggaran Fake GPS dan Scan Wajah

Tahun	Presentase (%)
2021	100%
2022	79%
2023	30%

Sumber: bkdjatengprov.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan data mengenai pelanggaran Fake GPS dan Scan Wajah dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran sebagai angka dasar 100%. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 79%, dan tahun 2023 semakin menurun hingga 30%. Meskipun penurunannya cukup baik, pelanggaran masih terjadi dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Tidak hanya melihat mengenai keuntungan atau keunggulan yang didapat saja, sebuah inovasi juga harus diperhatikan mengenai nilai dan kebutuhan pada penerimanya. Menurut Kartika Handayani, ketua BCI (BSI Innovation Center) Universitas BSI, penciptaan produk inovasi seharusnya tidak hanya berfokus pada teknologi atau tren baru, tetapi juga pada solusi yang benar-benar mengatasi kebutuhan bagi penggunaannya. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhan cenderung mengalami tantangan dalam penerapannya.

Pada absensi online Sinaga salah satu kendala yang ditemukan adalah belum semua pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memahami regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan, sehingga dapat menghambat penerapan absensi online dan informasi mengenai manajemen kepegawaian terhambat.

**Tabel 1.2 Peringkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dalam BKN Award 2023**

Kategori	Peringkat
Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik	60
Pengembangan Kompetensi	4
Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	20

Sumber: BKN Award 2023

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat 60 diantara instansi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia dalam kategori Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Manajemen ASN Terbaik, peringkat 4 dalam kategori Pengembangan Kompetensi tingkat instansi provinsi, dan peringkat 20 dalam kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian tingkat instansi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi.

Menurut Osborne dan Brown (2012) menyatakan bahwa inovasi dalam sektor pemerintah dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan, secara umum sektor publik memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi suatu negara, dengan menekan pengeluaran untuk penyediaan layanan serta meningkatkan mutu penyelenggaraannya, sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara.

Penerapan sebuah inovasi banyak ditemukan kendala salah satunya pada biaya infrastruktur dan operasional yang sangat mahal disertai dengan keterbatasan tenaga pegawai bidang IT. Disamping itu, penerapan absensi online Sinaga ditemukan berbagai kendala teknis yang memerlukan perhatian lebih. Beragam

kendala teknis kerap terjadi, seperti server down, error, hingga sinkronisasi data yang belum optimal, menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar sistem ini dapat berjalan secara maksimal.

Absensi online Sinaga masih menghadapi kendala teknis yang cukup signifikan, salah satunya adalah penggunaan teknologi dengan versi *free* yang memiliki banyak keterbatasan. Sistem ini sering mengalami gangguan seperti *error*, *server down*, serta masalah pada sinkronisasi data, terutama saat pegawai melakukan absensi menggunakan teknologi scan wajah. Ketidakstabilan ini menjadi tantangan besar, terutama mengingat jumlah pengguna yang mencapai puluhan ribu, sehingga teknologi yang digunakan belum mampu menangani beban yang besar secara optimal. Kendala teknis ini tidak hanya menghambat kelancaran operasional, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pegawai yang mengandalkan sistem untuk mencatat kehadiran.

Permasalahan yang baru saja terjadi yaitu peretasan akun website aplikasi “Sinaga”, karena sistem yang masih menggunakan *website* gratis. Penggunaan *website* gratis ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang perlu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Meskipun *website* gratis bisa menjadi sebuah pilihan yang efisien dari segi biaya, namun hal ini membuka peluang potensi peretasan. Selain itu, *website* gratis memiliki keterbatasan dalam hal fitur keamanan yang membuat rentan terhadap serangan siber, yang telah dialami pada aplikasi Sinaga yaitu peretasan. Dalam hal ini, penggunaan *website* gratis yang tidak memenuhi standar keamanan yang memadai mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan inovasi, khususnya terkait dengan bidang IT.

Penggunaan *website* gratis juga dapat mempengaruhi dalam berjalannya aplikasi, jika aplikasi absensi rentan terhadap serangan siber atau sering mengalami gangguan teknis, maka semua pengguna, baik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun OPD Provinsi Jawa Tengah lainnya akan merasa tidak nyaman. Terutama terkait dengan keamanan data, seperti absensi pegawai, yang sangat sensitif dan hal ini tentu akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap aplikasi absensi online Sinaga. Selama penerapan aplikasi absensi online Sinaga ditemukan banyak penilaian pengguna yang masih buruk, yang seharusnya pengguna merasa mudah dengan adanya absensi online Sinaga, akan tetapi masih ada pengguna merasa kesulitan ketika menggunakan atau memperbarui aplikasi ke versi terbaru.

Penilaian yang masih rendah dari pengguna, bisa menghambat keberhasilan penerapan aplikasi ini. Maka dari itu, penting bagi pemerintah fokus mengoptimalkan penggunaan potensi yang ada serta pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai dalam bidang teknologi informasi. Berikut terdapat data penilaian pengguna aplikasi Sianga.

Tabel 1.3 Penilaian Pengguna Aplikasi Sinaga Tahun 2024

Kategori	Presentase (%)
1. * = Sangat tidak suka	70%
2. ** =Tidak suka	9%
3. *** = Biasa saja	4%
4. **** = Menyukai	46%
5. ***** = Sangat menyukai	13%

Sumber: Play Store, diolah peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa mayoritas pengguna, yaitu 70%, memberikan penilaian sangat tidak suka terhadap aplikasi Sinaga. Sebanyak 9% pengguna menyatakan tidak suka, sementara 4% menilai aplikasi ini biasa saja. Di sisi lain, pengguna yang memberikan penilaian menyukai dan sangat menyukai masih tergolong rendah, masing-masing hanya 4% dan 13%. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap aplikasi Sinaga masih rendah, sehingga diperlukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas serta pengalaman pengguna.

Pada berjalannya penerapan inovasi, Ajib Rakhmawanto selaku asistem deputy Kementerian PANRB pada uji coba dan pembobotan instrumen evaluasi kualitas inovasi menyampaikan bahwa pengguna menjadi faktor utama dalam uji coba penerapan inovasi, uji coba sebagai alat untuk memetakan apakah inovasi sudah reliable dan valid atau belum sehingga perlu diperbaiki. Pada absensi online Sinaga memungkinkan pegawai untuk menguji sistem dalam skala kecil sebelum

penerapan penuh, ini dapat meningkatkan tingkat penerapan absensi online Sinaga.

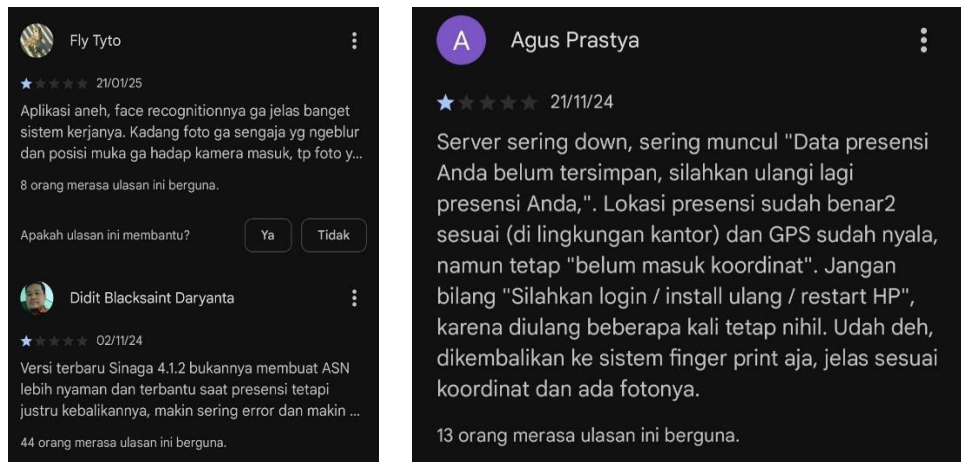
Uji coba tersebut yang nantinya menjadi alat observasi secara berkala guna memastikan apakah inovasi tersebut mudah diamati dan diterima pengguna atau sebaliknya. Observasi ini sifatnya luas dan spesifik bertujuan memantau penerapan. Dalam penerapannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah rutin melakukan observasi perbaikan berkelanjutan absensi online Sinaga berdasarkan masukan dan saran dari pegawai. Observasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan absensi *online* Sinaga berjalan dengan efektif dan efisien.

Afrianda et al. (2023) mengungkapkan bahwa hambatan teknis seperti *server down* dan aksesibilitas yang terbatas juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kehadiran online. Meskipun sistem ini menawarkan transparansi dalam pencatatan kehadiran, masalah teknis dan kemungkinan manipulasi lokasi melalui GPS palsu adalah tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa inovasi seperti absensi online Sinaga dapat diterapkan secara maksimal dan diterima oleh semua karyawan.

Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses maupun hasil dari pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keahlian teknologi, serta pengalaman dalam menciptakan atau menyempurnakan produk, layanan, maupun sistem baru yang memberikan nilai tambah secara signifikan (Arora et al., 2004). Inovasi merupakan sebuah entitas yang merujuk pada produk atau praktik baru yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi (Suwarno, 2008).

"Inovasi mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, atau rekayasa yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan secara praktis atau menemukan metode baru dalam pemanfaatan teknologi" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002). Inovasi ini berperan penting dalam mengoptimalkan waktu dan kualitas kerja berbagai sektor, termasuk dalam penerapan teknologi di pemerintahan.

E-government dan inovasi mempunyai hubungan yang kuat, dimana *e-government* menjadi sebuah wadah untuk menginisiasi, menerapkan, dan menyalurkan inovasi dalam berbagai aspek pemerintah. Seperti menyediakan *platform* digital yang memungkinkan pemerintah untuk dapat menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya. Selain itu, dapat menjalankan kolaborasi antar Lembaga dalam melaksanakan program layanan publik. *E-government* tidak hanya berfokus tentang penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah, tetapi juga mengenai perubahan cara berpikir dan budaya untuk mendorong inovasi. Dengan adanya *e-government* yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan bangsa.



Gambar 1. 2 Ulasan Pengguna Aplikasi Absensi Online Sinaga

Berdasarkan gambar 1.2, absensi online Sinaga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam keakuratan face recognition yang dianggap tidak konsisten oleh pengguna. Selain itu, versi terbaru aplikasi justru dinilai semakin sering mengalami error, sehingga bukannya mempermudah ASN dalam presensi, tetapi malah menghambat. Masalah lain yang dihadapi adalah seringnya *server down* dan kesulitan dalam pengenalan lokasi meskipun GPS sudah aktif dan lokasi sudah sesuai. Pengguna juga mengeluhkan solusi yang diberikan, seperti login ulang atau reinstall aplikasi, tidak efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada.. Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih optimal agar sistem ini benar-benar mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran pegawai.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana absensi online Sinaga merupakan inovasi baru dan diterapkan sebagai langkah baru reformasi birokrasi oleh pemerintah provinsi. Dirancang untuk mendukung pengelolaan absensi pegawai secara digital. Absensi online Sinaga hadir sebagai solusi atas kebutuhan modernisasi sistem absensi yang lebih

efisien, transparan, dan akurat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kepegawaian di tingkat provinsi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran utama proses perencanaan, dan penerapan absensi online Sinaga. Hal ini menjadikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lokus paling relevan untuk meneliti bagaimana inovasi ini diterapkan dan diintegrasikan ke dalam sistem kerja yang sudah berjalan.

Selain itu, pemilihan lokus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan untuk mengakses data empiris, seperti tingkat partisipasi dan kepuasan pegawai, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta dampaknya terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian. Di samping itu, pemilihan lokus di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan gambaran mendalam tentang kesiapan instansi pemerintah dalam menerima perubahan berbasis teknologi, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Informasi ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi dalam pengembangan aplikasi Sinaga khususnya absensi *online*, sehingga dapat memberikan peluang untuk menjadi model bagi penerapan inovasi serupa di instansi pemerintah lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan efektivitas manajemen kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, inovasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menilai

kinerja pegawai secara langsung. Sejak tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menetapkan bahwa fokus utama pemerintahan adalah pengembangan inovasi di sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, didorong untuk menciptakan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Analisis Atribut Inovasi dalam Penerapan Absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah untuk penelitian ini:

1. Kendala teknis dalam penggunaan absensi online Sinaga.
2. Masih ditemukannya *fake* GPS dan manipulasi *scan* wajah.
3. Komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian yang belum baik.
4. Website aplikasi yang masih rentan diretas.
5. Penilaian pengguna yang masih rendah mengenai aplikasi absensi online Sinaga .

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis atribut inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah?

2. Apa saja faktor yang penghambat dan pendukung dalam penerapan absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut berikut:

1. Menganalisis atribut inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mengembangkan pengetahuan peneliti dalam bidang evaluasi manajemen publik berupa inovasi absensi *online*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pemikiran di bidang administrasi publik serta menambah referensi bagi

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan inovasi *e-government* dalam peningkatan layanan publik.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan dari perspektif eksternal terkait implementasi sistem absensi online Sinaga.

4. Bagi Pembaca

penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan serta manfaat yang berguna sebagai sumber informasi untuk masyarakat mengenai proses penerapan inovasi *e-government* dalam pelayanan publik.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai inovasi pelayanan publik dalam manajemen pegawai pada absensi online Sinaga.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik di bidang manajemen publik.
3. Mengembangkan pengetahuan di bidang evaluasi manajemen publik.
4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai teori manajemen publik, terutama dalam hal inovasi pelayanan publik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terdahulu membantu dalam memposisikan penelitian serta dan peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel 1.3 merupakan hasil ringkasan dari penelitian terdahulu.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Afrianda, R. T., Syaprianto, S., & Sumarna, T. (2023). Evaluasi program Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. <i>Management Studies and Entrepreneurship</i> .	Menganalisis dampak penerapan sistem absensi online terhadap kedisiplinan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.	Teori Evaluasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi SIKO dilakukan melalui absensi dengan fitur pendeteksi wajah dan titik lokasi. memberikan peningkatan yang baik dalam manajemen kepegawaian, namun masih juga ditemukan beberapa kendala beberapa.

	<i>Journal (MSEJ)</i> , 4(3), 3110-3119.				
2.	Fardiana, N. (2019). Penerapan Absensi online “JATHILAN” Bagi Penilik Sekolah Ponorogo Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. <i>AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam</i> , 8(2), 65-85.	Meningkatkan efisiensi proses pengambilan absensi karyawan dan mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan karyawan dalam pengisian absensi.	Teori Sistem.	Deskripsi Kualitatif	Hasil dari evaluasi yang dilakukan pada kurun waktu tertentu menandakan bahwa respon para penilik sekolah cukup baik dan terdapat pengetatan dalam pola absen sehingga tingkat disiplin ikut meningkat secara signifikan.
3.	Putri, R. N., Rahmawati, A., & Iftidiani, D. (2023). Evaluasi Penerapan Inovasi Presensi Guru berbasis Online di Sekolah Dasar. <i>Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar</i> , 2(2), 157-167.	Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pengguna aplikasi SiBeMo dalam pencatatan kehadiran guru, khususnya dalam hal akurasi, efisiensi dan kemudahan penggunaan.	1. Teori Evaluasi 2. Teori inovasi	Kualitatif	Hasil penelitian melalui tahap evaluasi aplikasi SiBeMo memberikan peningkatan akurasi dan efisiensi presensi guru, meskipun perlu adanya perbaikan dalam mengatasi kendala teknis.
4.	Hutasoit, D.M., Eka, P., Purnamaningsih, Adi, K., & Wijaya, S.K. (2023). Efektivitas Penerapan Absensi online (Face Detector) Untuk	Menganalisis tentang efektivitas aplikasi absensi online (face Detector) di BKPSDM Provinsi Bali dalam	Teori efektivitas	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian adalah belum sepenuhnya efektif, dikarenakan dalam penerapannya belum sepenuhnya optimal, adapun indikator yang telah berjalan optimal yakni indikator

	Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. <i>Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis</i> .	meningkatkan kedisiplinan pegawai, baik pegawai PNS maupun Non PNS.			pencapaian tujuan dan integrasi. Sementara indikator adaptasi masih mengalami kendala dari aspek kemampuan pegawai dan sarana prasarana.
5.	Mahayani, N. M. H. (2023). Peran Aplikasi Situ OK dalam Mewujudkan e-Government di Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali. <i>Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan</i> , 10(2), 17–22.	Menganalisa dan mengidentifikasi dan tantangan tersebut agar aplikasi SITU OK dapat berperan lebih optimal dalam pelayanan publik.	1. Teori E-Government 2. Teori Good Governance		Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan aplikasi SITU OK sudah berjalan dengan baik, masih ada kendala yang harus diatasi agar fungsinya dalam E-Government dapat lebih maksimal.
6.	Nurfarisa, D., & Nugroho, T. C. (2023). Penerapan Teknologi Absensi Digital Sebagai Implikasi E-Government dalam Optimalisasi Manajemen Kehadiran Guru. <i>Prosiding SISFOTEK</i> , 7(1), 347-351.	Menganalisis implementasi absensi online dari tiga aspek utama, yaitu dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai (value).	Teori E-government	Deskriptif Kualitatif	Secara umum, penggunaan absensi digital menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kelancaran administrasi serta mutu kerja guru. Meski begitu, aspek komunikasi, penyesuaian, serta perlindungan privasi dan keamanan data perlu diperhatikan agar manfaat teknologi ini dapat dimaksimalkan.

7.	Syahputri, A. R. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Absensi online dan E-Logbook Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. <i>Fisip UNMUL</i> .	Menganalisis dan menilai efek penggunaan absensi digital dan e-logbook terhadap tingkat disiplin pegawai.	1. Teori Sistem 2. Teori Inovasi	Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem absensi online dan E-logbook berpengaruh secara positif, signifikan, dan dalam kategori sedang terhadap disiplin kerja pegawai di BKD Kalimantan Timur.
8.	Sutisna, N., Muhaemin, M., & Ramadhan, A. (2022). Difusi Inovasi Aplikasi Siputeri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pandeglang. <i>Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan</i> , 8(2).	Menganalisis pemahaman yang lebih baik tentang adopsi inovasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah tersebut.	Teori Inovasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian bahwa potensi besar untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitasnya.
9.	Nurhadiati, F., Lionardo, A., & Musdalifah, F.S. (2020). DIFUSI INOVASI APLIKASI HALLO PALEMBANG OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG.	Mengekplorasi, menganalisis masalah-masalah dalam penerapan aplikasi Hallo Palembang agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang	Teori Inovasi	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan penting bagi masyarakat, serta penting bagi dinas untuk terus meningkatkan sosialisasi aplikasi ini agar lebih banyak orang untuk memanfaatkannya.

		difusi inovasi dalam konteks aplikasi e-government di Kota Palembang.			
10.	Syukriyanti, H. N., Zainuddin, Z., & Apriansyah, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Absensi online Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. <i>Ganec Swara</i> , 17(4), 2167-2172.	Menganalisis dampak penggunaan aplikasi terhadap kedisiplinan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.	Teori SDM (2012) menjelaskan pentingnya pengelolaan SDM dalam organisasi, termasuk aspek disiplin pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas pelayanan.	Kuantitatif	Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan SIAO berhasil meningkatkan kedisiplinan pegawai, yang berdampak positif pada kualitas layanan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.
11.	Setiadi, A., Firmasnyah, F.I., Kusuma, N.R., & Fauzia, R.R. (2024). Effect Of Attendance Applications mobile Online (Akku Mobile) On Official Discipline At The Indramayu District Inspectorate. <i>Jurnal Manajemen Pelayanan Publik</i> .	Menganalisa pengaruh penggunaan aplikasi absensi online Akku Mobile terhadap disiplin pegawai di Inspektorat Kabupaten Indramayu.	Teori Evaluasi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Aplikasi Akku Mobile telah resmi diterapkan sejak tahun 2021 dan dianggap cukup berhasil dalam konteks penggunaan dan perlu adanya evaluasi yang berkelanjutan.

12.	Juhandi, J., & Ali, H. (2023). The Effect of Online Attendance, Performance Reporting Models and Additional Employee Income Allowance Schemes on Civil Servant Performance. <i>Dinasti International Journal of Management Science</i> , 4(6), 1144-1154.	Mengevaluasi pengaruh absensi online, model pelaporan kinerja dan skema tunjangan tambahan terhadap kinerja PNS di Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Teori Evaluasi	Mix method	Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa absensi online, pelaporan kinerja yang baik, dan insentif tambahan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pegawai negeri sipil.
13.	Abdullah, A., Mohammed, A. E., & Abduljabar, A. M. (2023). Electronic attendance system impact on healthcare employees' performance and economic impact in Saudi Arabia. <i>Saudi Journal of Business and Management Studies</i> , 8(11), 250-256.	Menganalisis proses penerapan sistem absensi elektronik, mencakup kendala yang muncul serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.	Teori Inovasi	Kualitatif	Penelitian ini membuktikan bahwa aplikasi manajemen kehadiran berbasis Android mampu menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi pencatatan kehadiran di lingkungan pendidikan.
14.	Noor, S. A. M., Zaini, N., Latip, M. F. A., & Hamzah, N. (2015, December). Android-based attendance management system. In <i>2015 IEEE Conference on</i>	Menganalisis pengembangan aplikasi manajemen kehadiran berbasis Android untuk mencatat kehadiran	Teori Inovasi	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa aplikasi manajemen kehadiran berbasis Android dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam

	<i>Systems, Process and Control (ICSPC)</i> (pp. 118-122). IEEE.	dosen dan mahasiswa.			pencatatan kehadiran di institusi pendidikan.
15.	Attour, A., & Chaupain-Guillot, S. (2020). Digital Innovations in Public Administrations: Technological or Policy Innovation Diffusion? <i>Journal of Innovation Economics & Management</i> .	Menganalisis perbedaan pengaruh antara kedua jenis faktor tersebut dalam konteks difusi e-government di kalangan pemerintah daerah di wilayah Grand Est, Prancis.	Teori Inovasi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan situs web oleh pemerintah daerah di wilayah Grand Est, Prancis dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor eksternal. Inovasi ini memberikan pengetahuan penting dalam konteks difusi e-government dalam meningkatkan layanan e-government.

Penelitian ini beda dari penelitian terdahulu dalam hal judul yang diambil yaitu analisis atribut inovasi absensi online “Sinaga” di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yang sebagian besar hanya berfokus pada peningkatan disiplin dan efisiensi sistem kehadiran online. Penelitian sebelumnya seperti Fardiana (2019), Afrianda et al. (2023), dan Putri et al. (2023) membahas absensi online dalam konteks peningkatan disiplin ASN, tetapi tidak banyak yang membahas lebih dalam mengenai tantangan teknis, penerimaan pengguna, dan dampak inovasi terhadap budaya kerja pemerintah. Penelitian ini mengisi kekurangan penelitian terdahulu dengan menganalisis atribut inovasi Rogers (2003), yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai bagaimana pegawai menerima teknologi ini dan tantangan apa yang mereka hadapi dalam penggunaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas teknis, tetapi juga meneliti proses adopsi inovasi di lembaga pemerintah, yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam evaluasi terhadap inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Metode ini digunakan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan pandangan pengguna terkait efektivitas

serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan absensi online Sinaga. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak dan aspek penerapan inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah bidang studi yang berfokus pada penelitian tentang kerja tim dalam lembaga atau organisasi yang dioperasikan oleh sektor publik. Sebagai bagian dari pengetahuan administratif, administrasi publik umumnya mengadopsi beberapa teori, konsep, dan teknik analisis yang digunakan dalam ilmu administrasi. Selain itu, administrasi publik juga mengintegrasikan teori dan konsep dari beberapa ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Menurut Pfiffner dan Presthus (1960), administrasi publik berfokus pada beberapa bidang penting sebagai berikut:

- a. Administrasi publik bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau lembaga politik.
- b. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai melakukan koordinasi antara individu atau kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Ini termasuk berbagai tugas operasional yang dilakukan pemerintah secara rutin.
- c. Dalam lingkup global, administrasi publik adalah proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dipandu oleh

keterampilan dan berbagai teknologi, serta memberikan arah dan tujuan bagi upaya banyak orang.

Menurut George J. Gordon dalam bukunya tentang ilmu administrasi (1997: 26), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut buku Chandler dan Plano (1988:29-30) yang berjudul "Enam Dimensi Administrasi Publik Strategis", administrasi publik adalah proses di mana sumber daya publik dan personel diorganisir dan disesuaikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, administrasi juga didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur sektor politik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan.

Gerald E. Caiden (1982) berpendapat bahwa variasi makna administrasi publik terlihat dari persepsi orang-orang terhadap istilah "administrasi publik". Beberapa orang menerjemahkan "administrasi" sebagai "administrasi publik", sementara yang lain menerjemahkannya sebagai "administrasi untuk kepentingan publik".

Menurut Gerald E. Caiden bahwa *administration for public* lebih diharapkan daripada *administration of public*. Hal ini dikarenakan *administration for public* menekankan bahwa administrasi publik seharusnya melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan aspirasi dan partisipasi aktif dari

masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan. Kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah dan bersama-sama mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, *administration of public* menitikberatkan peran pemerintah sebagai otoritas utama atau pengendali yang berperan aktif dalam merancang serta melaksanakan kebijakan yang dianggap paling sesuai bagi masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat diposisikan sebagai penerima kebijakan yang cenderung pasif, memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi, serta harus mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan.

Kajian dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa belum terdapat kesepakatan mengenai batasan atau definisi pasti dari "administrasi publik" karena konsep ini memiliki sifat yang kompleks (Lemay, 2002: 10). Konsep kompleksitas administrasi publik dikarenakan adanya multidimensi yang Dimana dalam administrasi publik melibatkan banyak dimensi seperti kebijakan publik, manajemen publik, proses pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Sehingga belum ada kesepakatan yang sama persis tentang batas atau definisi administrasi publik dan konsep tersebut akan terus berkembang dan menyesuaikan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat dan sektor publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah cara pandang, pola pikir, atau kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam melihat, menafsirkan, dan memecahkan masalah (Soedjadi, 2000). Dianggap sebagai perspektif mendasar yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, mencakup teori, konsep, maupun metode pendekatan yang

digunakan sebagai instrumen analisis dalam merespons suatu permasalahan. Dinamika perkembangan studi administrasi publik telah muncul sejumlah paradigma, berikut beberapa paradigma administrasi publik, meliputi:

a. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada periode ini, perhatian utama diberikan pada pemisahan antara politik dan administrasi, di mana politik seharusnya hanya berfokus pada perumusan kebijakan serta berbagai isu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan negara seperti berperan dalam pembuatan kebijakan, sementara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, dikotomi ini memiliki tujuan menjaga netralitas birokrasi agar tetap objektif dalam menjalankan kebijakan publik.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada masa ini, konsep manajerial berkembang dengan pesat dan mendapat penerimaan luas di berbagai sektor, termasuk industri dan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan administrasi, tanpa terikat pada misi, fungsi, budaya, atau struktur organisasi tertentu. Sejumlah pemikir di bidang administrasi telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan prinsip-prinsip ini, yang kemudian menjadi dasar dalam praktik manajemen modern. Pemikiran mereka terus berkembang dan berpengaruh dalam penerapan administrasi di berbagai institusi.

c. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Bidang tata kelola pemerintah sering dikaitkan dengan ilmu politik, karena tidak hanya fokus pada penerapan kebijakan, tetapi turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan regulasi. Secara fundamental, administrasi publik berperan dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Oleh karena itu, administrasi publik melalui pendekatan ilmu politik untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam administrasi negara.

d. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini telah menggeser fokus dari politik ke penerapan ilmu administrasi. Hal ini menandai upaya untuk melihat administrasi publik sebagai disiplin ilmu tersendiri yang menekankan pada teori dan teknik-teknik ilmu manajemen, seperti analisis organisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan lembaga pemerintah.

e. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan pandangan politik dan administrasi. Ilmu administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang unik dibanding disiplin lain dan dipandang sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi dengan pengaruh politik dalam birokrasi dan kebutuhan akan administrasi.

f. Governance (1990-sekarang)

Era governance ini ditandai dengan transisi dari birokrasi tradisional ke model yang lebih partisipatif dan kolaboratif, mengintegrasikan berbagai

sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan urusan publik. Memiliki fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi penting untuk menciptakan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen merupakan Ilmu Manajemen merupakan pengetahuan yang berdiri dan nantinya akan diterapkan, kemudian menilai apakah suatu tindakan dilakukan dengan cara yang paling mudah atau tidak (Frederick W. Taylor ,1947).

Menurut Woodrow Wilson dalam bukunya *The Study of Administration* (1887), ia menekankan perlunya peningkatan kualitas administrasi publik, terutama dalam lembaga pemerintahan, struktur organisasi, serta metode tata kelola. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada saat itu. Wilson mengusulkan empat prinsip utama dalam manajemen publik, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai elemen utama dalam struktur organisasi.
- b. Fungsi eksekutif menjadi aspek yang paling ditekankan.
- c. Pengembangan administrasi melalui pencarian prinsip dan teknik manajemen yang lebih efisien.
- d. Metode perbandingan digunakan sebagai pendekatan dalam studi serta pengembangan administrasi publik

Berkembangnya model dari manajemen publik yaitu *New Public Management* pada tahun 1990an (Hughes, 2003), Pendekatan ini telah memberikan

wawasan baru bagi perkembangan manajemen publik di berbagai negara, antara lain:

- a. Beralih dari konsep administrasi tradisional dengan lebih menitikberatkan pada pencapaian kinerja dan hasil kerja yang optimal.
- b. Mengurangi ketergantungan pada birokrasi konvensional serta menciptakan lingkungan organisasi, pegawai, dan tenaga kerja yang lebih fleksibel.
- c. Menetapkan sasaran organisasi dan individu dengan lebih terstruktur, sehingga memungkinkan evaluasi berbasis indikator yang jelas, termasuk aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- d. Pegawai senior lebih terlibat dalam dinamika politik pemerintahan sehari-hari dibandingkan mempertahankan posisi netral.
- e. Peran pemerintah lebih berorientasi pada mekanisme pasar dan kontrak kerja eksternal, sehingga layanan publik tidak selalu harus diselenggarakan oleh birokrasi.
- f. Mengurangi keterlibatan langsung pemerintah dalam berbagai sektor melalui kebijakan privatisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa *New Public Management* lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil dibandingkan dengan proses. Pendekatan ini dianggap sebagai perspektif baru dalam menerapkan fungsi manajemen di sektor publik. Namun, terdapat pandangan yang menolak konsep ini karena dianggap terlalu berorientasi pada model manajemen sektor swasta, sedangkan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda, yakni berfokus pada kepentingan publik.

1.5.5 E-government

E-government merujuk pada penggunaan TIK oleh Lembaga pemerintahan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik kepada warga negara, bisnis. Hal ini mencakup pengembangan laman online, digitalisasi proses pemerintahan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Gartner Study (2000) dalam Rachmad Edhie Y. dkk (2024:1) keputusan. Konsep *e-government* mencakup beberapa bentuk hubungan, yaitu antara pemerintah dan warga (G2C), pemerintah dan sektor bisnis (G2B), serta koordinasi antar instansi pemerintah (G2G). Model ini digunakan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan adaptif dalam memberikan layanan publik

Tujuan utama dari *e-government* yaitu memudahkan interaksi antara pemerintah dan stakeholders. Meningkatkan transparansi kegiatan pemerintah dan mempercepat proses penyelenggaraan layanan publik. *E-government* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan. *E-government* terdiri dari berbagai komponen teknologi dan non teknologi, yaitu:

- a. Infrastruktur TIK. Termasuk koneksi internet, data center, dan perangkat keras dan lunak yang mendukung operasi *e-government*.
- b. Aplikasi dan Layanan Online: Portal dan aplikasi yang dirancang untuk menyediakan informasi dan layanan kepada pengguna.

- c. Kebijakan dan Regulasi. Kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung implementasi dan operasi *e-government*.
- d. Kapasitas dan Keterampilan SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mengelola dan menjalankan sistem *e-government*.
- e. Keterlibatan dan Partisipasi Publik. Mekanisme untuk memastikan bahwa warga negara dan bisnis dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi layanan *e-government*.

Menurut Layne dan Lee (2001), terdapat empat tahapan dalam pengembangan e-government yang membantu birokrasi dalam merancang sistem pemerintahan berbasis digital, yaitu:

- a. Katalogisasi. Pada tahap awal ini, pemerintah mulai membangun kehadiran digital dengan menyediakan informasi dan layanan dasar secara daring.
- b. Katalogisasi. Pada tahap awal ini, pemerintah mulai membangun kehadiran digital dengan menyediakan informasi dan layanan dasar secara daring.
- c. Integrasi Vertikal. Merujuk pada keterhubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam berbagai fungsi dan layanan publik untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi.
- d. Integrasi Horizontal. Tahap ini mencerminkan penyatuan berbagai layanan pemerintah dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pemanfaatan teknologi secara maksimal untuk pelayanan publik, termasuk di bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.

E-government dalam upaya strategis pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan layanan publik serta menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, yaitu memudahkan akses terhadap informasi dan layanan pemerintah melalui laman online. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dengan menyediakan akses langsung ke informasi publik, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan penyelenggaraan layanan dengan mengotomatisasi proses administrasi, serta memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih luas dalam proses pengambilan Keputusan melalui *e-voting*, konsultasi online, dan mekanisme feedback lainnya.

1.5.6 Inovasi Pelayanan Publik

Menurut E. M. Rogers dan Shoemaker (1971), inovasi dalam pelayanan publik merujuk pada gagasan, metode, atau benda yang dipandang sebagai sesuatu yang baru, dinilai berdasarkan waktu sejak pertama kali digunakan atau ditemukan. Jika suatu ide tersebut dianggap baru bagi individu, maka dianggap sebagai inovasi.

Inovasi merupakan alat khusus dalam kewirausahaan serta sebuah seni yang memungkinkan sumber daya digunakan dengan cara baru untuk menciptakan nilai ekonomi. Menurut Beck dan Whistler (1967), inovasi mencerminkan suatu kebaruan, di mana konsep ini berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baru oleh individu, organisasi, atau masyarakat. Meliputi pengembangan dan implementasi dari suatu hal yang baru, bukan menuju kepada produk orisinal, melainkan menghadirkan pembaruan. Dalam konteks ini, kebaruan merujuk pada penerapan ulang suatu konsep yang sudah ada dengan mengombinasikannya secara berbeda

dalam aspek ruang dan waktu. Selain itu, inovasi juga berperan dalam mengurangi batasan geografis dan waktu dengan menggunakan kemajuan TIK.

Menurut Osborne dan Brown (2012) dalam buku inovasi pelayanan publik, inovasi dalam sektor pemerintah dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Berbagai jenis inovasi, seperti inovasi proses, produk, dan pelayanan telah dilakukan di sektor pemerintah. Namun, terkadang dari ketiga jenis inovasi tersebut sulit untuk dibedakan karena pengembangan produk inovatif akan diikuti oleh pembaruan dalam proses serta peningkatan layanan.

Peluang dari penerapan inovasi dalam sektor publik sangat luas, meskipun karakteristik sektor ini berbeda di setiap negara. Secara keseluruhan, sektor publik memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan menekan biaya penyediaan layanan serta meningkatkan mutu dan struktur pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara.

Davis (1989) melalui model *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan teknologi bergantung pada manfaat dan kemudahannya bagi pengguna. Jika sistem absensi online Sinaga dianggap sulit digunakan atau tidak meningkatkan efisiensi pegawai, maka tingkat adopsinya akan rendah. Model ini juga menganalisis persepsi pegawai terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan Sinaga dalam pencatatan kehadiran mereka.

Teori Innovation Capability Maturity Model (ICMM) yang dikembangkan oleh Adams et al. (2006) juga dapat digunakan untuk menganalisis kesiapan

organisasi dalam mendukung inovasi. Model ini menilai kematangan inovasi dalam organisasi melalui faktor seperti kapasitas inovasi, strategi, dan kesiapan teknologi. Dalam implementasi Sinaga, pemahaman tentang tingkat kesiapan inovasi dapat membantu memastikan sistem ini dapat diterapkan dengan optimal.

Dengan demikian, inovasi layanan publik memegang peran krusial dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan relevansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat. Inovasi tersebut tidak hanya mencakup kebaruan dalam produk atau teknologi, tetapi juga proses, metode dan pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan terus menerapkan inovasi, maka sektor pemerintah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam pelayanan sesuai kebutuhan.

Inovasi sendiri dalam administrasi publik mengacu pada perubahan struktur dan proses organisasi. Pada sistem administratif, dalam pengetahuan menjalankan pekerjaan manajemen, keterampilan manajemen dalam sebuah organisasi. Selain itu, inovasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelayanan publik atau praktik tata kelola pemerintahan, dengan memperhatikan 8 sasaran yaitu, organisasi, prosedur operasional, regulasi hukum, kompetensi aparatur, mekanisme pengawasan, tanggung jawab transparan, layanan masyarakat, serta pola pikir dan etos kerja. pegawai.

1.5.7 Atribut Inovasi

Atribut inovasi dipahami sebagai kriteria atau parameter inovasi. Penerapan inovasi pada sektor publik dapat dinilai dari seberapa efektif dalam mencapai tujuan dan memberikan nilai tambah bagi pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai

kebutuhan. Atribut inovasi menurut Rogers (dalam Hadi Prabowo, 2022: 42-43) terdiri dari:

a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*).

Menganalisis sejauh mana inovasi memiliki keuntungan, manfaat bagi penerimanya yaitu pegawai. Tingkat keuntungan inovasi pada absensi online Sinaga dapat dilihat melalui keuntungan relatif secara ekonomi, kebaruan, kepuasan, kenyamanan dalam penggunaannya karena memiliki aspek yang sangat penting.

b. Kesesuaian (*Compability*)

Kesesuaian dengan inovasi yang telah dilakukan dengan kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Tingkat kesesuaian pada absensi online Sinaga dinilai melalui kesesuaian dengan cara berdasarkan nilai dan peraturan yang sedang berlaku yang sesuai dengan kebutuhan pegawai saat ini.

c. Kerumitan (*Complexity*)

Melihat kesulitan dalam penerimaan dan pemanfaatan inovasi oleh pegawai. Tingkat kerumitan suatu inovasi dinilai dari upaya yang dilakukan dalam penerapan inovasi ini. Pada absensi online Sinaga dilihat dari kemudahan dalam dipelajari dan dipahami, kemudahan dalam penyesuaian lingkungan serta penyebaran dalam penerapan inovasi.

d. Kemungkinan Dicoba (*Trialability*)

Dalam sebuah inovasi harus melalui uji coba untuk menguji kualitas sebuah inovasi agar mampu menunjukkan keunggulannya dan dapat diterima oleh

penggunanya. Melakukan analisis kemampuan diujicobakan pada inovasi absensi online Sinaga dapat dilihat dari kemudahan diuji coba dan kemudahan dalam penggunaan untuk membantu pelaksanaan kinerja pegawai.

e. Kemudian diamati (*Observability*)

Inovasi perlu mudah dimengerti dari cara kerjanya serta mampu memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan inovasi sebelumnya dengan tujuan memberikan keyakinan pada pegawai sebagai pengguna dan penerima inovasi. Melakukan analisis kemampuan untuk diamati pada absensi *online Sinaga* dengan melakukan observasi seberapa mudah mengkomunikasikan kepada pengguna mengenai dampak dan manfaat kegunaan inovasi oleh pegawai.

Teori atribut inovasi dari Rogers (2003) dipilih karena memberikan pendekatan komprehensif dalam menganalisis bagaimana suatu inovasi diterima dan diadopsi oleh pengguna. Model ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian, terutama di sektor publik, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan teknologi baru. Dalam konteks absensi online Sinaga, teori ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga memahami persepsi dan pengalaman pegawai dalam mengadopsi inovasi.

1.5.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi

Pelaksanaan sebuah inovasi, diperhatikan faktor-faktor mendukung dan menghambat dalam penerapan inovasi. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi berasal dari aspek internal maupun eksternal, pada perencanaan

dan pelaksana inovasi yaitu pegawai. Faktor-faktor pendukung dan penghambatan yang dikemukakan oleh Freeman (1987) antara lain:

1. Jaringan Kolaborasi

Mengenai keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau peran yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu.

2. Akses teknologi

Meliputi infrastruktur dan teknologi dalam penerapan inovasi

3. Kebijakan

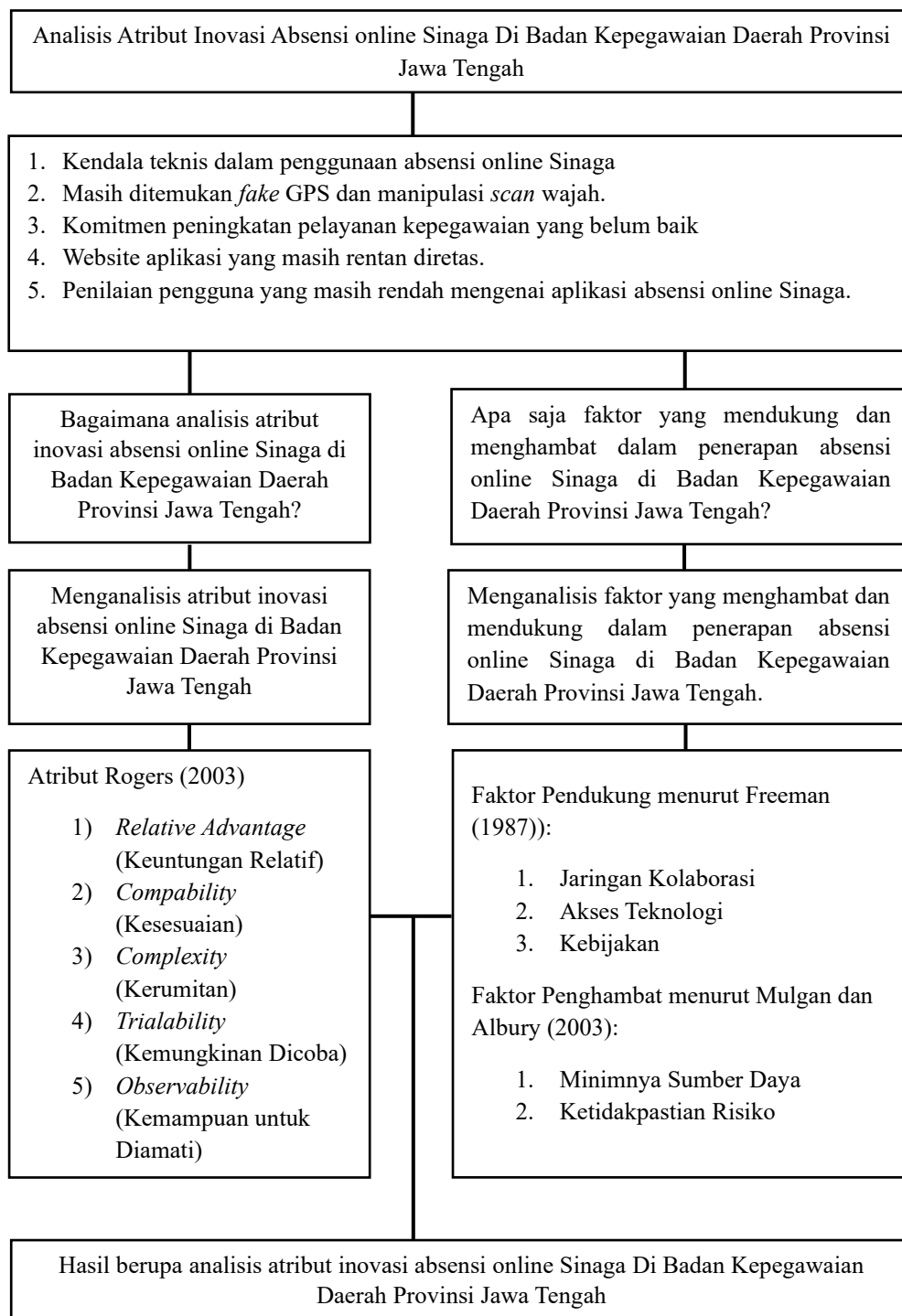
Mengenai aturan atau keputusan pemerintah dalam menciptakan penerapan inovasi.

Dalam pelaksanaannya, menurut Mulgan dan Albury (2003) sebuah inovasi dalam pelaksanaannya tidak langsung berjalan dengan lancar atau tanpa adanya hambatan. Banyak inovasi menghadapi kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Minimnya Sumber Daya, keterbatasan anggaran, tenaga kerja dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan inovasi secara efektif.
2. Ketidakpastian risiko, adanya potensi kegagalan atau dampak yang tidak terduga sering kali membuat organisasi ragu dalam mengadopsi inovasi, sehingga memperlambat proses perubahan.

1.6 Kerangka Berpikir

Tabel 1.5 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasional Konsep

1.7.1 Atribut inovasi

Atribut inovasi absensi online Sinaga dalam analisisnya menggunakan karakteristik yang meliputi *relative advantages*, *compability*, *complexity*, *trialability* dan *observability*, mengenai sistem informasi manajemen kepegawaian yang digagas oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah atas arahan Gubernur Jawa Tengah yang memberikan manfaat kepada pegawai dan menyelesaikan permasalahan pada sektor publik secara langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran pegawai dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Jawa Tengah dapat dinilai melalui *relative advantages*, *compability*, *complexity*, *trialability* dan *observability*.

Atribut inovasi dibagi menjadi lima bagian, dimana atribut ini sebagai parameter dalam menganalisis absensi online Sinaga. Berikut merupakan karakteristik inovasi absensi online Sinaga Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

a. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*).

Menganalisis sejauh mana inovasi memiliki keuntungan, manfaat bagi penerimanya yaitu pegawai. Tingkat keuntungan inovasi pada absensi online Sinaga dapat dilihat melalui keuntungan relatif secara ekonomi, kepuasan, kenyamanan dalam penggunaannya karena memiliki aspek yang sangat penting.

b. Kesesuaian (*Compability*)

Kesesuaian dengan inovasi yang telah dilakukan dengan kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Tingkat kesesuaian pada absensi online Sinaga dinilai melalui kesesuaian dengan cara berdasarkan nilai dan peraturan yang sedang berlaku yang sesuai dengan kebutuhan pegawai saat ini.

c. Kerumitan (*Complexity*)

Melihat tingkat kesukaran dalam menerima dan menggunakan inovasi bagi penerima yaitu pegawai. Tingkat kerumitan suatu inovasi dinilai dari upaya yang dilakukan dalam penerapan inovasi ini. Pada absensi online Sinaga dilihat dari kemudahan dalam dipelajari dan dipahami, kemudahan dalam penyesuaian lingkungan serta penyebaran dalam penerapan inovasi.

d. Kemungkinan Dicoba (*Trialability*)

Dalam sebuah inovasi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan tujuan untuk menguji kualitas sebuah inovasi agar mampu menunjukkan keunggulannya dan dapat diterima oleh penggunanya. Melakukan analisis kemampuan diujicobakan pada inovasi absensi online Sinaga dapat dilihat dari kemudahan untuk dicoba dan kemudahan dalam penggunaan untuk membantu pelaksanaan kinerja pegawai.

e. Kemudian diamati (*Observability*)

Inovasi perlu dirancang agar mudah dipahami dari sisi berlangsungnya inovasi itu bekerja serta mampu menghasilkan peningkatan lebih baik daripada inovasi sebelumnya atau berkelanjutan dengan tujuan memberikan

keyakinan pada pegawai sebagai pengguna dan penerima inovasi. Melakukan analisis kemampuan untuk diamati pada absensi *online Sinaga* dengan melakukan observasi seberapa mudah mengkomunikasikan kepada pengguna mengenai dampak dan manfaat kegunaan inovasi oleh pegawai.

Tabel 1.6 Operasional konsep Atribut Inovasi

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati di Lapangan
Atribut Inovasi	Keuntungan Relatif (<i>Relative Advantage</i>).	- Inovasi absensi online Sinaga dapat memberikan keuntungan ekonomi baik bagi pemerintah maupun pegawai. - Absensi online Sinaga diciptakan harus mampu memberikan kemudahan kepada penerima - Tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan absensi online Sinaga
	Kesesuaian (<i>Compability</i>)	- Kesesuaian absensi online Sinaga dengan nilai dan norma yang berlaku - Kesesuaian absensi online Sinaga dengan pengalaman masa lalu - Kesesuaian absensi online Sinaga dengan kebutuhan pegawai
	Kerumitan (<i>Complexity</i>)	- Pengguna paham mengenai penggunaan absensi online Sinaga - Kemampuan pegawai dalam menggunakan absensi online Sinaga

	Kemampuan Dicoba (<i>Trialability</i>)	- Kemungkinan untuk dicoba dalam penerapan absensi online Sinaga - Kemudahan memperoleh informasi cara penggunaan absensi online Sinaga
	Kemudian diamati (<i>Observability</i>)	- Kemudahan dalam observasi berjalannya absensi online Sinaga - Manfaat yang diterima pengguna dari penerapan absensi online Sinaga

1.7.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi

1. Faktor Pendukung

Terdapat berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat dalam penerapan inovasi, termasuk absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis untuk menilai sejauh mana keberhasilan serta tantangan dalam penerapan absensi online Sinaga di instansi tersebut.

- a. Adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan absensi online Sinaga
- b. Tersedianya infrastruktur teknologi dalam berlangsungnya inovasi absensi online Sinaga
- c. Adanya kebijakan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan absensi online Sinaga

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, menurut Mulgan dan Albury (2003) sebuah inovasi dalam pelaksanaannya tidak langsung berjalan dengan lancar atau tanpa adanya hambatan. Banyak inovasi menghadapi kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

3. Minimnya Sumber Daya, keterbatasan anggaran, tenaga kerja dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam mengimplementasikan inovasi secara efektif.
4. Ketidakpastian risiko, adanya potensi kegagalan atau dampak yang tidak terduga sering kali membuat organisasi ragu dalam mengadopsi inovasi, sehingga memperlambat proses perubahan.

Tabel 1.7 Operasional Konsep Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Yang Diamati di Lapangan
Faktor Pendukung	Keterlibatan pihak terkait	- Koordinasi pihak terkait dalam pengembangan absensi online Sinaga. - Kerjasama antara pihak terkait dan antar bidang dalam pelaksanaan dan evaluasi absensi online Sinaga.
	Infrastruktur teknologi yang memadai	- Jaringan internet dapat mempengaruhi pegawai saat melaksanakan absensi. - Adaptasi bagi pegawai yaitu sebagai pengguna absensi online Sinaga
	Dukungan regulasi	- Adanya peraturan atau keputusan yang mewajibkan penggunaan aplikasi Sinaga sebagai absensi.

Faktor Penghambat	Minimya Sumber Daya	Sumber daya yang tersedia atau dibutuhkan dalam absensi online Sinaga
	Ketidakpastian Risiko	Kendala atau risiko yang terjadi selama penerapan absensi online Sinaga

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan prosedur ilmiah yang diterapkan untuk mengumpulkan data yang terpercaya dan sah, dengan tujuan menemukan, membuktikan, serta mengembangkan pemahaman guna menyelesaikan dan mengantisipasi suatu permasalahan (Sugiyono, 2013: 3).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Andi Prastowo (2010), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data berbentuk narasi deskriptif, baik melalui tulisan maupun ucapan dari individu, serta perilaku yang diamati selama penelitian berlangsung.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial tertentu. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif dalam bentuk narasi, gambar, tindakan yang bisa diamati tentang analisis atribut inovasi absensi online Sinaga di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi pendekatan untuk menggambarkan secara detail bagaimana absensi online Sinaga diterapkan

termasuk proses, kebijakan terkait, kendala yang dihadapi, dan tanggapan dari para pegawai terhadap inovasi absensi online tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian dengan menetapkan dan mempertajam fokus pada masalah penelitian. Penelitian ini akan mengamati penerapan sesuai atribut inovasi yang dilakukan dalam inovasi absensi *online*. Situs penelitian ini di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Instrument Penelitian

Penelitian kualitatif dalam mencari topik yang diteliti masih belum terdefinisi secara jelas, begitu pula dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian masih bersifat tentatif dan akan berkembang seiring dengan pelaksanaan studi di lapangan. Dalam instrumen penelitian kualitatif tidak dapat disusun secara menyeluruh hingga permasalahan yang menjadi fokus kajian telah teridentifikasi dengan pasti.

Peran peneliti dalam melakukan suatu penelitian berperan sebagai elemen utama dalam pendekatan kualitatif. Setelah arah penelitian semakin jelas, maka dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana yang bertujuan untuk melengkapi data serta membandingkannya dengan informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan diskusi terarah. Peneliti akan turun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan merumuskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2013: 222-224).

Peneliti yang memiliki peran sebagai instrument kunci dalam pengumpulan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data tersebut dibantu dengan berbagai alat-alat penelitian, seperti: (Andi Praswoto 2012: 43), antara lain:

a. Buku catatan

Buku catatan atau notebook berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber.

b. *Tape recorder* (Video/Audio)

Alat perekam untuk menyimpan seluruh isi percakapan sumber data.

Alat yang sering digunakan dalam merekam sumber data yaitu menggunakan handphone, sehingga dalam pengambilan dalam perekaman suara, video sumber data menjadi lebih lengkap dan jelas.

1.8.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang bertindak sebagai informan dalam memberikan data yang relevan kepada peneliti terkait fenomena yang akan diteliti. Informan harus memahami tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan data

yang relevan. Pertimbangan ini mencakup memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman paling mendalam mengenai topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana jika informasi yang diberikan oleh seorang informan masih kurang lengkap, maka akan mencari informan lain yang dapat menambah data hingga informasi yang diperoleh semakin kaya dan mendalam.

Dalam menentukan informan, peneliti dapat menggunakan dua cara. Pertama, memperoleh rekomendasi dari pihak yang berwenang, baik secara resmi seperti dari instansi pemerintah maupun secara tidak resmi dari tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau figur lain yang berpengaruh. Kedua, melakukan wawancara pendahuluan agar dapat menilai apakah calon informan memenuhi kriteria yang diperlukan. Kriteria tersebut mencakup kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, kemampuan berbicara dengan baik, serta tidak terlibat dalam konflik antar kelompok di lingkungan penelitian. Selain itu, informan juga sebaiknya memiliki pandangan tertentu terkait peristiwa yang diteliti (Moleong, 2010:133).

Pada penelitian ini, peneliti telah menentukan beberapa subyek yang dapat dijadikan sebagai informan terkait penerapan inovasi absensi online Sinaga, yaitu:

- a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, bertugas sebagai ketua pelaksana pengimplementasian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam penerapan absensi online Sinaga. Hasil wawancara ini bertujuan untuk menggali sumber daya pendukung dalam penerapan inovasi absensi online Sinaga.

- b. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (INKA), sebagai pejabat yang memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan data informasi serta penerapan absensi online Sinaga. Hasil Wawancara ini bertujuan untuk menggali kondisi riil penerapan inovasi absensi online Sinaga.
- c. Tim Teknisi Bidang Informasi Kepegawaian, sebagai pejabat yang memantau mengenai pengembangan, pemeliharaan, dan penanganan penerapan inovasi absensi online Sinaga.
- d. Staff Bidang E-government Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, sebagai pejabat yang berperan langsung dalam pengembangan dan implementasi layanan berbasis elektronik, termasuk koordinasi teknologi yang digunakan di instansi pemerintah.
- e. Staff Bidang E-government Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, sebagai pejabat yang berperan langsung dalam koordinasi teknologi yang digunakan di instansi pemerintah.
- f. Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai biro yang memiliki tugas utama dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap tata kelola organisasi serta penerapan inovasi pelayanan publik.

1.8.5 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) dalam Moleong (2007: 157-163), penelitian kualitatif mengutamakan data berupa narasi dan tindakan, sementara data tambahan seperti dokumen berperan sebagai pelengkap. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan mencakup kata-kata dan

tindakan, serta berbagai sumber tertulis, gambar, data statistik yang diperoleh selama observasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tentang evaluasi inovasi penerapan absensi online Sinaga Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data akan dikumpulkan berkaitan dengan atribut inovasi absensi online Sinaga yang berasal dari wawancara Sekretaris, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian (INKA), Tim Teknisi Aplikasi Sinaga dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Informan lain staff Bidang E-government Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil wawancara tersebut bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian mengenai analisis atribut inovasi absensi online Sinaga.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung, bersifat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku tentang inovasi pelayanan, serta laporan, arsip, dan dokumen di BKD Provinsi Jawa Tengah.

1.8.7 Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan. Peneliti menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur dengan pendekatan mendalam, mengajukan pertanyaan terbuka yang fleksibel tanpa terikat pedoman baku. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan guna mengumpulkan bukti yang relevan sebagai landasan analisis

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2009: 244) menyatakan proses menyusun dan mengolah data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lainnya agar mudah dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Proses ini mencakup pengorganisasian data, pemecahan ke dalam unit-unit tertentu, penyusunan pola, sintesis, serta pemilihan informasi yang relevan untuk dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data berlangsung sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan model analisis data dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 247), langkah-langkah analisis meliputi:

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Sebelum memasuki lapangan, peneliti telah melakukan analisis awal terhadap data sekunder atau hasil studi pendahuluan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan fokus penelitian, yang nantinya dapat berkembang setelah penelitian dilakukan secara langsung di lapangan.

b. Analisis Data di lapangan

Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelahnya. Peneliti menganalisis tanggapan dari narasumber dan data yang diperoleh menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007: 246). Proses ini berjalan secara berulang hingga data dianggap cukup dan memadai untuk dianalisis lebih lanjut.

1.8.9 Kualitas Data atau Keabsahan Data

Kriteria data yang diperoleh harus valid, reliabel, dan objektif. Kepercayaan dan keabsahan data sangat penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan uji keabsahan data dengan beberapa metode berdasarkan Sugiyono (2007: 270), yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Metode ini dilakukan dengan kembali ke lapangan untuk mengobservasi serta mewawancarai sumber data, baik yang sudah pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan, hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi lebih akrab, terbuka, dan saling percaya, sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Peneliti juga dapat memverifikasi apakah data yang dikumpulkan sebelumnya masih relevan dan benar. Bukti perpanjangan pengamatan ini dapat diperkuat dengan adanya surat keterangan yang dilampirkan dalam laporan penelitian.

b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan yang lebih mendalam, kontinu, dan sistematis. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan keakuratan data, mengidentifikasi kemungkinan kesalahan, serta menyusun deskripsi yang lebih rinci dan sistematis mengenai fenomena yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode pengumpulan data, serta waktu pengambilan data. Teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan tidak bias.